

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para khalifah.¹ Di bawah kepemimpinan para khalifah, Islam (sebagai agama) mulai disebarkan lebih luas lagi. Tercatat hingga abad ke-8 M, pengaruh Islam telah menyebar ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol.² Kemudian pada masa dinasti Umayyah,³ pengaruh Islam mulai berkembang hingga Nusantara.⁴

¹ Kata *khilafah* dalam gramatika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subyek atau pelaku yang aktif yang disebut *khalifah*. Kata *khilafah* dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut *khalifah*. Oleh karena itu tidak akan ada suatu khilafah tanpa adanya seorang khalifah. Secara literal *khilafah* berarti penggantian terhadap pendahulu, baik bersifat individual maupun kelompok. Secara teknis, *khilafah* adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-qur'an dan Sunnah. Khilafah merupakan medium untuk menegakkan *din* (agama) dan memajukan *syariah*. Kata *khalifah* sendiri berasal dari akar kata *kh-l-f*, yang berarti menggantikan, mengikuti, atau yang datang kemudian. Lebih jauh lihat, Ajat Sudrajat, "Khilafah Islamiyah Dalam Lintasan Sejarah", dalam *Makalah Seminar*, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2011, h. 2-4. Juga masih terdapat konsepsi berbeda tentang bentuk (teknis) pemerintahan yang terjadi pasca *khulafaur rasyidin*. Dapat lihat, Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (terj: Muhammad al-Baqir), (Bandung: Mizan, 2007). Peneliti dalam penelitian tesis ini lebih merujuk pada terma *khilafah* sebagai konsepsi pemerintahan Islam.

² Ekspansifitas kekuatan Islam berkembang pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah dengan ditaklukkannya berbagai wilayah hingga mencapai Spanyol. Lihat, Philip K Hitti, *History of The Arabs* (terj: Penerbit Serambi), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 258-268.

³ Dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 H/661 M di Damaskus dan berlangsung hingga pada tahun 132 H/ 750 M. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang politisi handal di mana pengalaman politiknya sebagai Gubernur Syam pada zaman Khalifah Ustman bin Affan cukup mengantarkan dirinya mampu mengambil alih kekuasaan dari genggamannya keluarga Ali Bin Abi Thalib. Tepatnya setelah Husein putra Ali Bin Thalib dapat dikalahkan oleh Umayyah dalam pertempuran di Karbala. Mu'awiyah dinobatkan sebagai khalifah di 'Iliya (Yerusalem) pada 40 H/660 M. Dengan penobatannya itu, ibu kota propinsi Suriah, Damaskus, berubah menjadi ibu kota kekhilafahan Islam. Kekuasaan dan kejayaan Dinasti Bani Umayyah mencapai puncaknya di zaman al-Walid. Dan sesudah itu kekuasaan mereka menurun. Lebih jauh dapat lihat, *Ibid*, 235-240.

⁴ Meskipun wilayah Muslim Nusantara/Asia Tenggara secara kultural kurang ter-arabisasi, bahasa Arab memainkan peran penting dalam kehidupan sosial keagamaan kaum Muslim. Berbagai suku di Nusantara mengadopsi peristilahan Arab ke dalam kehidupan mereka. Sejumlah kosakata Arab yang diadopsi masyarakat Nusantara berkaitan dengan berbagai permasalahan politik. Untuk menyebut contoh misalkan, *daulat*, *sultan*, *khalifah*, *baiat*, *tadbir*, *harb*, *jihad*, *aman*, *majlis*, *musyawarah*, *hukum*, *qanun*, dsb. Penggunaan kosakata politik Islam dapat dipastikan menjadi meluas ketika institusi politik Islam mulai berdiri pada akhir abad ke-13. Dengan konversi penguasa ke Islam, entitas politik yang selama ini dikenal sebagai kerajaan kini secara resmi disebut kesultanan. Pengaruh dinasti Umayyah telah terasa ketika Nusantara masih berdiri beragam kerajaan bercorak Hindu-Budha. Pengaruh ini dibuktikan dengan adanya

Sejarah mencatat, kepulauan-kepulauan Nusantara⁵ merupakan daerah penghasil rempah-rempah terbesar di dunia dan telah menjadi jalur perdagangan laut internasional. Dengan posisinya sebagai bagian jalur perdagangan ini, membuat Nusantara memiliki akses yang mudah dengan dunia luar serta tentu terlibat dalam interaksi internasional sehingga mendapat banyak pengaruh dari peradaban sekitarnya. Interaksi Nusantara dengan kawasan Timur Tengah sudah pernah ada, tak terkecuali dengan peradaban Islam yang diperkirakan telah masuk pada abad ke-7 M.⁶ Pada awalnya interaksi tersebut lebih berbentuk relasi ekonomi dan perdagangan yang terbatas pada pencarian komoditas rempah-rempah dan komoditas lain yang diperlukan,⁷ namun pada saat kawasan Timur

dua pucuk surat yang dikirimkan oleh Maharaja Sriwijaya waktu itu kepada khalifah di masa Bani Umayyah. Surat pertama dikirimkan kepada Muawiyah dan surat kedua pada masa Umar bin Abdul Aziz. Uka Tjandrasasmita, "Five Hundred Years of Historical Relationship", dalam *Makalah Seminar Internasional oleh Fakultas Sastra UI dan Portuguese Center for The Study of Southeast Asia*. Depok, 9-11 Oktober 2000. h. 32.

⁵ Nusantara merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Kata ini tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan (abad ke-12 M hingga ke-16 M) untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit. Kata ini kemudian sempat terlupakan dan pada awal abad ke-20 M istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara. Istilah ini muncul dimasa Indonesia masuk ke masa pergerakan sehingga memiliki makna politis. Pihak Belanda kemudian juga menganggap istilah ini sebagai sesuatu yang subversif. Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara Sejarah Indonesia* (terj: Samsudin Berlian), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), h. xiv-xvi.

⁶ Kisah pengislaman penduduk Nusantara yang didahului dengan kedatangan seorang Muslim, apakah itu dari Arab, Persia, Turki, atau peristiwa mimpi kedatangan Nabi adalah tipikal kisah-kisah Islamisasi di Nusantara. Secara khusus dalam Tambo Minangkabau, umpamanya mengisahkan kejadian Alam Minangkabau bersamaan dengan dua alam lain, yaitu Benua Ruhum (Benua Rum atau Turki Utsmani) sebagai penguasa wilayah Barat dan Benua Cina sebagai penguasa wilayah Timur. Dalam tradisi muslim Gayo di Aceh, juga menceritakan bahwa setelah terbentuk pulau Sumatera, Penguasa Rum dipercaya datang ke Aceh. Ali Muzakir, *Perspektif Baru Tentang Tiga Belas Abad Islam di Jambi*, dalam *Jurnal Inovatio*, Vol. IX, No. 1. Januari-Juni 2010. h. 161. Dua hal ini menunjukkan Islam yang masuk ke kawasan Nusantara, di beberapa wilayah dihubungkan dengan keberadaan Turki Utsmani/Rum. Keberadaan Dinasti Cina juga menarik untuk ditelusuri lebih jauh mengingat interaksi penduduk Nusantara juga dilakukan dengan utusan Cina yang datang. Dalam hubungannya dengan Islam, keberadaan Laksamana Cheng-Ho dengan perannya mengislamisasi Nusantara menjadi penting untuk diungkap. Lihat, Tan Ta Sen, *Cheng Ho: Penyebar Islam dari China ke Nusantara* (terj: Abdul Kadir), (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h. 191-215. Walau begitu, masih terdapat diskursus tentang waktu dan tempat awal mula Islam hingga masuknya Islam ke Nusantara. Muara dari diskursus ini kemudian melahirkan beragam teori tempat dan waktu tentang masuknya Islam ke Nusantara yang bermuara pada tiga teori besar. Namun para ahli juga telah menyepakati untuk membedakan antara kedatangan, penerimaan, penyebaran dan pelebagaan Islam di Nusantara. Lebih jauh dapat lihat, Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 59-63.

⁷ Termasuk juga diskursus soal saluran dan pembawa Islam ke Nusantara yang juga melahirkan beragam teori. Dapat lihat, M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h.

Tengah telah berada dalam kekuasaan kekhilafahan, relasi tersebut meluas menjadi relasi politik-keagamaan dan intelektual.

Munculnya Bani Utsmani⁸ dalam rentang panjang sejarah Islam di dunia dengan prestasinya yang berhasil menaklukan ibukota Romawi Timur, Konstantinopel, semakin menjadikan Turki Utsmani menjadi populer di hati umat Islam dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, yaitu Dinasti Syafawi di Persia/Iran dan Mughal di India.⁹ Dengan keberhasilannya menaklukan Konstantinopel maka para penguasa-penguasa di Dinasti Utsmani digelar Sultan Rum. Istilah Rum sendiri lekat kaitannya dengan Byzantium-Konstantinopel dan juga pada Kerajaan Romawi secara umum.¹⁰

Kekuatan politik dan militer khilafah Utsmaniyah kemudian mulai terasa di kawasan lautan India pada awal abad ke-16 M. Sebagai khalifah kaum Muslim, Turki Utsmani memiliki posisi sebagai penjaga dua tanah haram, yaitu Mekah dan

83-95. Namun dalam konteks perdagangan, Hubungan dagang antara Nusantara dan bangsa Arab telah berlangsung jauh sebelum kerasulan Muhammad. Suku Quraisy berdagang sampai ke Hadhramaut (wilayah Yaman sekarang). Diaspora orang Hadhramaut inilah yang membawa Islam ke Nusantara. Para pedagang Muslim Arab diyakini telah berkunjung ke Nusantara sejak paruh kedua abad ke-7 Masehi atau abad satu Hijrah/Hijriyah. Sebagian mereka menetap dan menikah dengan wanita lokal, yang kemudian membentuk nukleus komunitas Muslim. Ali Muzakir, *Perspektif Baru Tentang Tiga Belas Abad Islam di Jambi*, h. 156.

⁸ Bani Utsmani adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah mongol dan daerah utara negeri Cina. Bani Utsmani selanjutnya mendirikan kekuasaan politik di wilayah Turki dan lazim dikenal dengan Turki Utsmani. Lebih lengkap lihat, Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 182.

⁹ Masa kemunculan Turki Utsmani, Syafawi di Persia, dan Mughal di India disebut sebagai zaman tiga kerajaan besar. Zaman ini berlangsung pada 1500-1700 M. Di masa kemajuan ketiga kerajaan besar ini mempunyai kejayaan masing-masing, terutama dalam bentuk literatur dan arsitek. Masjid-masjid dan gedung-gedung indah yang didirikan di zaman ini masih terlihat di Istanbul, Tibriz dan Isfahan serta kota-kota lain di Iran dan Delhi. Kemajuan umat Islam di zaman ini lebih banyak merupakan warisan kemajuan di masa periode klasik. Perhatian pada ilmu pengetahuan masih kurang bila dibanding kemajuan yang dicapai pada masa Abbasiyah. *Ibid*, 166. Persaingan antar tiga kerajaan ini pada akhirnya meluas hingga ke persaingan perebutan pengaruh politik di berbagai belahan dunia yang lain. Dapat dikatakan bahwa persaingan tiga kerajaan ini dimenangkan oleh Turki Utsmani.

¹⁰ Terkait penaklukan Byzantium-Konstantinopel dan penggelaran Sultan Rum dapat lihat, Roger Crowley, *1453: Detik-Detik Jatuhnya Konstantinopel ke Tangan Muslim* (terj: Ridwan Munzir), (Jakarta: Alvabet, 2005), h. 45-65.

Madinah. Pada posisi ini, para Sultan Utsmani mengambil langkah-langkah khusus untuk menjamin keamanan bagi perjalanan haji.¹¹

Dalam konteks hubungannya dengan Nusantara, Turki Utsmani telah menjalin hubungan diplomatik, terutama dengan kesultanan Aceh. Hal ini terwujud dengan diberikannya bantuan militer kepada Aceh yang kala itu sedang menghadapi ekspansi Portugis.¹² Bantuan militer ini menjadi semakin mempererat hubungan diplomatik antara Aceh dan Turki Utsmani yang dengannya maka kesultanan Aceh secara resmi menyatakan kepada penguasa Turki Usmani sebagai sebuah *vassal state* dari Turki Utsmani itu sendiri. Deklarasi ini kemudian membawa dampak lebih jauh kepada Turki Utsmani sebagai negara induk untuk menjaga dan melindungi negara *vassal*-nya dari beragam gangguan yang muncul kala itu.¹³ Turki Ustmani kemudian semakin menancapkan pengaruhnya di lautan India yang pada akhirnya memperlancar pelayaran para penyebar Islam ke

¹¹ Turki Utsmani mengamankan rute haji dari wilayah sebelah Barat Sumatera dengan menempatkan angkatan lautnya di Samudra Hindia. Kehadiran angkatan laut Turki Utsmani di Lautan Hindia setelah 904 H/1498 M tidak hanya mengamankan perjalanan haji bagi umat Islam Nusantara, tetapi juga mengakibatkan semakin besarnya saham Turki dalam perdagangan di kawasan ini. Pada gilirannya, hal ini memberikan dampak penting bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi sebagai dampak sampingan dari ibadah haji. Di saat yang sama Portugis juga meningkatkan kekuatannya di Lautan Hindia, namun begitu Turki Utsmani masih tetap mempertahankan supremasinya di kawasan Teluk Persia, Laut Merah, dan Lautan Hindia sepanjang abad ke-16 M. Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaharuan Islam Indonesia Edisi Perenial*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 36-37.

¹² Hal ini dapat dilihat ketika Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar naik tahta di Aceh pada tahun 943 H/1537 M, ia kelihatan menyadari kebutuhan Aceh untuk meminta bantuan militer kepada Turki. Bukan hanya untuk mengusir Portugis di Malaka, tetapi juga untuk melakukan penaklukan ke wilayah-wilayah yang lain, khususnya daerah pedalaman Sumatera, seperti daerah Batak. al-Qahar menggunakan pasukan Turki, Arab dan Abesinia. Pasukan Turki sebanyak 160 orang ditambah 200 orang tentara dari Malabar, mereka membentuk kelompok elit pasukan bersenjata Aceh. Selanjutnya pasukan ini dikerahkan al-Qahhar untuk menaklukan wilayah Batak di pedalaman Sumatera pada tahun 946 H/1539 M. Mendez Pinto, yang mengamati perang antara pasukan Aceh dengan Batak, melaporkan kembalinya armada Aceh di bawah komando seorang Turki bernama Hamid Khan, keponakan Pasya Utsmani di Kairo. Terkait dinamika hubungan politik-ekonomi-militer-agama antara Aceh dan Utsmani dapat lihat, *Ibid*, 44-47. Dapat lihat juga, Bernard Lewis, *Apa Yang Salah? Sebab-Sebab Runtuhnya Khilafah dan Kemunduran Umat Islam* (terj: Ahmad Lukman), (Jakarta: Ina Publikatama, 2004), h. 15-17. Ulasan lengkap juga dapat lihat, A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta: Penerbit Beuna, 1983), h. 97-119.

¹³ Azyumardi Azra, *Dari Harvard Sampai Makkah*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2005), h. 11-12. Ulasan lengkap soal hubungan Turki Utsmani dan (bagian barat) Indonesia, terutama Aceh, dapat lihat, Anthony Reid, *Sixteenth Century Turkish Influence in Western Indonesia*, dalam *Journal of Southeast Asian History*, Vol. 10, No. 3, Dec. 1969, h. 395-414.

Nusantara. Sebagai dampaknya maka terjalin aliansi politik antara Turki Utsmani dan kesultanan-kesultanan Islam lainnya yang ada di Nusantara.¹⁴ Bahkan, hubungan antara Turki Utsmani dan Nusantara juga kembali diangkat baru-baru ini dalam forum Kongres Umat Islam Indonesia ke-VI yang diselenggarakan pada Februari 2015 M di Yogyakarta. Dalam kongres tersebut, salah satu pembicara yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan pidato pembukaan yang turut menyinggung hubungan historis antara tanah Jawa dan Turki Utsmani.¹⁵

Selain itu juga terdapat bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan antara Turki Utsmani dan Nusantara. Sejumlah penguasa Muslim di Nusantara mengusahakan legitimasi gelar sultan mereka dari penguasa politik dan keagamaan di Timur Tengah.¹⁶ Tokoh penguasa Banten, Abd al-Qadir (berkuasa 1625-1651 M) misalnya, pada 1638 M menerima anugerah gelar sultan dari Syarif

¹⁴ Selain kesultanan Aceh yang menjalin pakta militer dengan Turki Utsmani -berlanjut sampai perang berkepanjangan dengan Belanda-, salah satu kesultanan Islam lain di Nusantara yaitu kesultanan Jambi juga menjalin pakta militer dengan Turki Utsmani. Sultan Thaha Saifuddin, tokoh perlawanan Jambi melawan Belanda dari 1855-1914 M, pernah mengirim utusan kerjasama pakta militer dengan Turki Utsmani. Diharapkan dengan kebesaran Dinasti Turki Utsmani, pihak Belanda tidak berani mengganggu wilayah Jambi. Permohonan Sultan Thaha sampai juga didengar oleh penguasa Turki Utsmani, dengan menanyakan kepada Duta Besar Belanda tentang status wilayah Jambi, apakah bagian dari Hindia Belanda atau bukan. Lihat dalam, Ali Muzakir, *Perspektif Baru Tentang Tiga Belas Abad Islam di Jambi*, h. 162.

¹⁵ Dalam pidato pembukaannya Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan, “*Pada 1479, Sultan Turki mengukuhkan R. Patah sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa, perwakilan kekhalifahan Islam (Turki) untuk Tanah Jawa, dengan penyerahan bendera Laa ilaah illa Allah berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain Kiswah Ka'bah, dan bendera bertuliskan Muhammadur Rasulallah berwarna hijau. Duplikatnya tersimpan di Kraton Yogyakarta sebagai pusaka, penanda keabsahan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat wakil Kekhalifahan Turki*”. Naskah lengkap dari pidato pembukaan dalam acara KUII ke-VI dapat lihat, <http://krjogja.com/read/248080/inilah-pidato-lengkap-sultan-pada-pembukaan-kuii-vi.kr>. Diakses 30 Mei 2015, pukul 20.10 WIB.

¹⁶ Tak cuma soal gelar sultan, usaha para raja-raja muslim nusantara untuk mendapat legitimasi politik Islam juga dilakukan dengan menarik silsilah keturunan yang menghubungkan dirinya dengan Iskandar Dzu al-Qarnayn, Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis, dan Penguasa Turki Utsmani. Tradisi politik Islam yang didasarkan pada kesatuan aqidah menjadikan entitas politik Islam di Nusantara juga dipandang bagian integral dari *Dar al-Islam* dari Timur Tengah atau Dinasti Turki Utsmani. Martin van Bruinessen, *Muslim of The Dutch East Indies and The Caliphate Question*, dalam *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 2, No. 3, tahun 1995, h. 120-140.

Mekah. Tokoh lain, Pangeran Rangsang, penguasa Mataram, pada 1641 M menerima gelar Sultan Abdullah Maulana Matarami juga dari Syarif Mekah.¹⁷

Berbagai sumber telah menyebutkan tentang kegigihan sebagian penguasa Muslim Nusantara untuk mendapatkan gelar sultan dari kekhilafahan Islam di Timur Tengah, yang diwakili oleh Syarif Mekah. Hal ini bukan saja menunjukkan hasrat kuat mereka agar mendapatkan legitimasi tetapi juga mengisyaratkan keinginan untuk mengasosiasikan diri dengan kekuasaan Khilafah Islam. Dengan kata lain, entitas dan Muslim *polities* di kawasan Nusantara ingin diakui sebagai bagian integral dari kekhalifahan Islam, terutama dengan Turki Utsmani.¹⁸

Hubungan lebih jauh -walau masih menjadi polemik-, yaitu dikirimkannya *da'i*/utusan agama untuk menyebarkan Islam di Nusantara terutama di pulau Jawa. Para utusan ini dikirimkan oleh pihak Turki Utsmani dan kelak dikenal dengan nama Wali Songo.¹⁹ Dari beragam fakta sejarah ini dapat dipahami bahwa Khilafah Islam -terutama pada masa Turki Utsmani- telah menunjukkan

¹⁷ Ahmad Syahid, et.al, *Ensiklopedia Tematik Dunia Islam Asia Tenggara*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 54.

¹⁸ Secara kultural, nama para Sultan Turki bahkan disebut dalam setiap khutbah Jumat yang dilakukan di Nusantara hingga akhir abad ke-19 M, walau kemudian dalam keseharian posisi Sultan Turki ini tidak memiliki pengaruh sama sekali. Kapan waktu dimulainya penyebutan Sultan Turki dalam tiap khutbah juga tidak bisa dipastikan. Lihat, Abdul Aziz, *Chieftdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), h. 109-115. Lihat pula, Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 115.

¹⁹ Beberapa historiografi lokal masyarakat, seperti di Aceh mengisahkan kedatangan seorang Arab bernama Syaikh Abd Allah 'Arif sekitar untuk mengislamkan rakyat Aceh. Asal-usul kesultanan Aceh juga diyakini berasal dari keturunan Arab yang bernama Syaikh Jamal al-'Alam, yang dikirim oleh Sultan Utsmani dari Turki. Historiografi dari Jawa meriwayatkan Maulana Malik Ibrahim (wafat 822 H/1419 M) yang diyakini telah mengislamkan banyak penguasa di sepanjang pesisir utara Jawa. Ia beberapa kali membujuk penguasa Majapahit, Vikramavardhana (memerintah 1386-1429 M) agar masuk Islam. Pada perkembangannya muncul Raden Rahmat, seorang keturunan Arab dari Campa. Melalui Raden Rahmat (Sunan Ampel), Islam berhasil masuk ke istana Majapahit. Seorang Arab lain, Nur al-Din Ibrahim b. Mawlana Izra'il (Sunan Gunung Djati), mengislamkan Jawa bagian barat dan berhasil memapankan Islam di Kesultanan Cirebon. Mereka adalah sebagian dari Wali Songo yang berjasa mengislamkan banyak penduduk Jawa. Lihat, R.O. Winstedt, *The Advent of Muhammadanism in the Malay Peninsula and Archipelago*, dalam *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. 77, tt, h. 171-173. Dapat lihat juga, Budiono Hadi Sutrisno, *Sejarah Wali Songo: Misi Pengislaman di Tanah Jawa*, (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2010), h. 10-15. Lihat juga, Azyumardi Azra (ed.), *Berderma Untuk Semua*, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 193-194.

eksistensinya di Nusantara sejak masa Kerajaan Hindu-Budha atau sejak Khilafah itu sendiri kokoh menjadi negara yang menaungi berbagai bangsa di dunia. Kekhilafahan pun mendapatkan pengakuan dari para sultan Nusantara sehingga muncul pengakuan mereka kepada kekhilafahan Islam.

Hubungan antara kesultanan di Nusantara dengan kekhalifahan Turki Utsmani ini menandakan telah adanya hubungan internasional antar keduanya. Dalam konteks hubungan internasional maka, hubungan antara kesultanan di Nusantara dengan kekhalifahan Turki Utsmani ini menandai adanya konsep penyatuan/integrasi politik internasional. Secara teoritis, integrasi politik internasional adalah sebuah proses di mana sekelompok masyarakat, yang pada awalnya diorganisasikan dalam dua atau lebih negara yang mandiri, bersama sama mengangkat sebuah keseluruhan politik yang dalam beberapa pengertian dapat digambarkan sebagai sebuah “komunitas”. Integrasi ini menitikberatkan perhatiannya pada proses atau *relationship*, di mana pemerintahan secara kooperatif bertalian bersama seiring dengan perkembangan homogenitas kebudayaan, sensitivitas tingkah laku, kebutuhan sosial ekonomi, dan interdependensi yang dibarengi dengan penegakan institusi supranasional yang multidimensi demi memenuhi kebutuhan bersama. Hasil akhirnya adalah kesatuan politik dari negara-negara yang terpisah di tingkat global maupun regional.²⁰ Berangkat dari pemahaman teoritis ini, dapat dilihat bahwa berbagai

²⁰ Konsep mengenai integrasi politik internasional ini berbeda dengan konsep serupa tentang internasionalisme/regionalisme, kerjasama internasional/regional, organisasi internasional/regional, gerakan internasional/regional, sistem internasional/regional, dll. Lebih jauh lihat, Tom Travis, *Usefulness of Four Theories of International Relations in Understanding the Emerging Order*, dalam *International Studies Journal*, Vol. 31, No. 3, 1994, h. 251-256. Lihat pula, Ali Martin dan Sugiarto Pramono, *Faktor-faktor Pendorong Integrasi Regional: Studi Perbandingan Uni Eropa dan ASEAN*, dalam *Spektrum: Jurnal Ilmu*

fakta historis hubungan kesultanan dan Turki Utsmani, menunjukkan bahwa ada upaya dari beberapa kesultanan (terutama sekali kesultanan Aceh) di Nusantara untuk mengupayakan dirinya berintegrasi dengan Turki Utsmani dengan berbagai faktor pendorong yang berujung pada meleburnya kesultanan menjadi bagian dari Turki Utsmani.

Adanya hubungan integral ini kemudian terus memupuk kesadaran dan ketertarikan masyarakat Nusantara terhadap Turki Utsmani. Ketertarikan ini kemudian terus berlanjut hingga awal abad ke-20 M dimana masyarakat Nusantara telah mulai menyadari identitas nasional mereka sebagai Bangsa Indonesia. Gagasan nasional di Hindia Belanda (Indonesia)²¹ kala itu juga dilatarbelakangi dengan kondisi Turki Utsmani, terutama gerakan Turki Muda yang dianggap menginspirasi perjuangan nasional bangsa Indonesia.²² Namun, kondisi Turki Utsmani diawal abad ke-20 M justru mulai mengalami beragam

Politik Hubungan Internasional, Vol. 8, No. 1, Januari 2011, h. 28-30. Lihat pula, Tim Penulis, *Ambiguitas Perdamaian*, (Jakarta: LIPI Press, 2006), h. 22.

²¹ Penyebutan kawasan Hindia didasari pada pandangan umum masyarakat Eropa yang pertama kali datang dan beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut Hindia Muka dan daratan Asia Tenggara dinamai Hindia Belakang, sementara kepulauan nusantara memperoleh nama Kepulauan Hindia (*Indische Archipel*, *Indian Archipelago*, *l'Archipel Indien*) atau Hindia Timur (*Oost Indie*, *East Indies*, *Indes Orientales*). Nama lain yang kelak juga dipakai adalah Kepulauan Melayu (*Maleische Archipel*, *Malay Archipelago*, *l'Archipel Malais*). Bagi orang non Eropa kawasan Nusantara disebut sebagai Lautan Timur, Kepulauan Timur, dan Kepulauan Hindia. Belanda sendiri menggunakan istilah Hindia, Hindia Timur, daerah jajahan Hindia, serta *Tropisch Nederland*. Semakin berkembangnya hubungan politik Belanda dengan Hindia memunculkan istilah *Insulinde* atau pulau-pulau Hindia, Hindia Timur Belanda, serta berpuncak pada penyebutan Hindia Belanda. Hindia Belanda juga merupakan wilayah yang tertulis dalam UU kerajaan Belanda tahun 1814 sebagai wilayah berdaulat kerajaan Belanda. UU ini diamandemen tahun 1848, 1872, dan 1922 menurut perkembangan wilayah Hindia Belanda sendiri. R.E. Elson, *The Idea of Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Gagasan* (terj: Zai Anshor), (Jakarta: Serambi, 2009), h. 1-2. Istilah Indonesia sendiri sebenarnya sudah mulai dikenal diawal tahun 1920-an. Namun, dalam tesis ini peneliti menggunakan istilah Hindia Belanda untuk merujuk kawasan Indonesia saat ini yang lebih didasari pada pertimbangan geografis dan politis.

²² AK Pringgogidgo, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1950), h. 7-8. Turki Muda sendiri merupakan sebuah gerakan kontra pemerintahan/oposisi terhadap pemerintahan Abdul Hamid II sebagai sultan Turki terakhir. Gerakan ini pada dasarnya mencoba untuk menentang praktik absolutisme Abdul Hamid dan sebagai kontra ideologi Pan-Islam dengan ideologi Pan-Turki. Terkait dinamika Turki Muda secara lebih jauh dapat lihat, Dudung Abdurrahman, *et al*, *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: Lesfi, 2012), h. 150-155.

kemunduran. Turki Utsmani menjadi pihak yang kalah dalam Perang Dunia I dengan keadaan yang lemah, miskin, dan ekonomi nyaris bangkrut. Puncak dari situasi pemerintahan yang lemah dan kacau ini adalah runtuhnya (kekhalfahan) Turki Utsmani dan menjadi (Republik) Turki Modern dengan dipimpin oleh Mustafa Kamal Attaturk.²³

Peristiwa runtuhnya Turki Utsmani tersebut segera menjadi berita yang menyebar dan mengejutkan dunia Islam. Kondisi ini tidak terlepas dari paham Pan-Islam yang saat itu memengaruhi banyak umat Islam di berbagai belahan dunia termasuk di Hindia Belanda. Ada kaitan yang erat antara paham Pan-Islam dan jabatan khalifah. Paham ini memiliki tujuan untuk menyatukan seluruh dunia Islam di bawah satu kekuasaan politik dan agama yang dikepalai oleh seorang khalifah. Oleh karena itu, ketika jabatan ini dihapuskan, ada banyak umat Islam yang merespon dan memperjuangkannya agar tegak kembali.²⁴

Keruntuhan Turki Utsmani juga bukan persoalan orang Turki semata tetapi telah menjadi persoalan umat Islam yang lain karena selama ini lembaga khilafah telah berdiri bersama umat Islam lebih dari seribu tahun. Tentang hubungan antara umat Islam dengan khilafah serta alasan persoalan ini menjadi

²³ Mustafa Kemal mengubah sistem pemerintahan Turki yang semula berbentuk kekhilafahan menjadi bentuk negara Republik Turki. Erik J. Zürcher, *Sejarah Modern Turki* (terj: Karsidi Diningrat), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 215-216. Dalam konsepsi ini istilah kemunduran masih berupa diskursus dalam masa transisi Turki Utsmani menjadi Turki Modern. Namun, konsepsi kemunduran ini menandakan bahwa kekhilafahan Turki Utsmani sejatinya mengalami masa kemunduran pada pertengahan 1900-an dengan disebabkan beragam faktor. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Turki Utsmani, yang meliputi: perluasan wilayah, administrasi yang tidak beres, bangsa dan agama yang heterogen, kebobrokan Konstantinopel, penghianatan para putri istana, pemberontakan zukisyariah, budaya pungli merajalela, dekadensi moral, perang yang berkesinambungan, mengabaikan kesejahteraan rakyat, dan munculnya gerakan rasionalisme. H.D. Sirojuddin, *Sejarah Kebudayaan Islam I*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1995), h. 332-333.

²⁴ Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 80-83.

diperbincangkan, Muhammad Dhia'uddin ar-Rais, seorang Guru Besar Jurusan Sejarah Islam Universitas Kairo menuturkan,

*Sesungguhnya Khilafah ini bukan milik Turki saja melainkan milik dunia Islam seluruhnya. Ia adalah sebagian dari warisan umat Islam, peninggalan sejarah dan lambang persatuan mereka. Khilafah merupakan pimpinan spritual bangsa-bangsa Islam di segenap penjuru bumi. Khilafah ini telah berlangsung lebih dari seribu tiga ratus tahun. Sejak umat Islam mengadakan rapat untuk memilih Abu Bakar Shiddiq (Sahabat Nabi) sebagai pengganti Rasulullah Muhammad saw. Beliau itulah sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam, diikuti oleh Khalifah kedua al-Faruq Umar bin Khaththab, begitulah seterusnya silih berganti sepanjang masa, dalam berbagai dinasti sehingga berakhir pada abad keduapuluh ini. Oleh karena itu, wajar jika umat Islam memperhatikan dengan sungguh-sungguh soal Khilafah ini dan memikirkan akibatnya, serta berpikir apa yang akan terjadi kelak di masa mendatang.*²⁵

Begitu pentingnya keberadaan lembaga khilafah, maka berita penghapusan ini mendatangkan respon dari dunia Islam yang berupaya untuk menegakkan khilafah kembali. Secara teoritis, respon dapat berarti tanggapan ataupun jawaban individu sebagai kesan yang dihasilkan dari pengamatan. Maka dalam konteks respon, umat Islam secara umum melihat bahwa peristiwa penghapusan khilafah di Turki sebagai sebuah penguat/*reinforce* atas respon alamiah yang telah dimunculkan sebelumnya.²⁶ Respon atas keruntuhan Turki Utsmani dapat dikatakan menjadi faktor penguat atas munculnya respon berupa upaya revitalisasi jabatan khalifah. Ide untuk mencari pengganti jabatan khalifah terus bergulir dan terus diperbincangkan.²⁷

Berita mengenai keruntuhan Turki Utsmani ini juga sampai hingga ke Hindia Belanda (Indonesia) dan mendapat respon dari ulama serta tokoh

²⁵ Muhammad Dhia'uddin Ar-Rais, *Islam dan Khilafah di Zaman Modern* (terj: Alwi), (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), h. 45.

²⁶ Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 271-272.

²⁷ Beragam respon kaum muslim dunia, termasuk di Hindia Belanda (Indonesia) akan dibahas lebih jauh di bab-bab selanjutnya.

pergerakan Islam saat itu baik dengan alasan historis, teologis dan juga politis. Selain itu, peristiwa ini juga ditindaklanjuti oleh kaum muslim di Hindia Belanda dengan melakukan beragam aktivitas lain yang menunjukkan pentingnya untuk mewujudkan kembali persatuan Islam dengan konsepsi khilafah. Pelan tapi pasti sejak saat itu gagasan perjuangan khilafah terus bergulir di Hindia Belanda. Mereka menginginkan agar khilafah dapat tegak kembali dan menyatukan umat Islam di seluruh dunia.²⁸

Beberapa fakta historis seperti yang telah diulas ini menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok umat Islam Hindia Belanda di masa itu memahami Islam sebagai agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Secara teoritis, Islam dipahami sebagai agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan (akhlak, ibadah, dan muamalah). Teori mengenai Islam sebagai agama yang sempurna secara sepintas juga dibenarkan al-Qur'an, walau dalam beberapa batasan-batasan tertentu tidak ditemukan petunjuk lebih teknis didalam al-Qur'an.²⁹ Termasuk pula soal khilafah, sebagai efek langsung dari kejatuhan Turki Utsmani dimana umat Islam Hindia Belanda secara teoritis juga memahami bahwa khilafah adalah posisi pemimpin dan pelindung bagi seluruh umat Islam dunia.

Dalam konteks hari ini, wacana mengenai kekhalifahan juga masih menimbulkan respon yang berbeda-beda baik pro maupun kontra. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pihak yang pro terhadap wacana revitalisasi khilafah, terutama Hizbut Tahrir (Indonesia) yang menjadi pihak yang sangat *concern*

²⁸ Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 127-128.

²⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 1-2.

dengan isu revitalisasi khilafah. Tidak cuma itu, kampanye tentang khilafah juga menjadi rebutan berbagai kelompok lainnya,³⁰ bahkan menjadi semakin *booming* semenjak fenomena munculnya ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Selain mereka yang kemudian pro dengan gagasan ini, mereka yang kontra merespon wacana ini sebagai wacana utopis yang dipengaruhi oleh gagasan dan gerakan transnasional³¹ yang juga berujung bahwa wacana revitalisasi khilafah saat ini justru membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya pro dan kontra ini semakin menandakan bahwa masih beragamnya pemahaman umat Islam di Indonesia terhadap konsepsi politik Islam.³²

Maka, fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengungkap alasan umat Islam merespon keruntuhan Turki Utsmani serta mengungkap pula bagaimana bentuk dan upaya umat Islam Hindia Belanda merespon keruntuhan Turki

³⁰ Beberapa organisasi Islam lain yang turut menjadikan politik Islam, lebih khusus lagi khilafah, sebagai tujuan perjuangan antara lain Ikhwanul Muslimin, Front Islam Pembebasan (FIS Aljazair), serta Majelis Mujahidin (Indonesia). Lihat, Abu Za'rur, *Seputar Gerakan Islam* (terj: Yahya Abdurrahman), (Bogor: al-Azhar Press, 2014), h. 123-227. Peneliti melihat organisasi massa di Indonesia yang sangat *concern* dengan persoalan khilafah saat ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Lebih jauh soal gagasan khilafah Hizbut Tahrir Indonesia, dapat lihat, Muhammadun, *Gerakan Pendirian Khilafah (Studi terhadap Gagasan dan Strategi Hizbut Tahrir Indonesia)*. (Palembang: Tesis Pascasarjana IAIN Raden Fatah, 2009).

³¹ Transnasional merupakan konsep yang tidak dapat dibahas bila tidak mencoba memahaminya, setidaknya dengan, melalui pemahaman kondisi internasionalisasi atau globalisasi yang sudah terdengar sejak awal 1990-an. Transnasional didasarkan pada hubungan ruang sosial-geografis dan tidak dalam sebuah cakupan ruang yang terpaku secara seimbang dan eksklusif dari ruang sosial dan ruang geografis. Ruang transnasional dapat dipahami sebagai rangka acuan dari struktur keseharian praktik-praktik, posisi sosial, arahan biografi pekerjaan, dan identitas manusia, serta secara bersamaan berada diatas dan lebih dalam dari konteks sosial masyarakat nasional. Bentuk dan hubungan sosial transnasional yang dikenal umumnya berupa proses migrasi, aktifitas ekonomi internasional dan gerakan politik. Mohammad Irvan Olii, *Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnasional Crime*, dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4, No. I, September 2005, h. 15-17.

³² Terdapat kerancuan berpikir yang mengatakan bahwa politik Islam hanya diartikan sebagai kegiatan dakwah dan sosial semata. Hal ini sah saja menjadi hak masing-masing dalam mengartikannya. Hal inilah yang kemudian menjadikan agama sebatas kekuatan moral. Hal seperti ini tidak bisa dikaitkan dengan politik. Dalam politik harus terdapat tujuan yang jelas atas dasar apa dan apa yang perlu dikerjakan karena politik adalah kekuatan pemaksa dan bukan kekuatan moral semata. Ada banyak terminologi yang kemudian juga digunakan untuk orang yang menghendaki Islam sebagai jalan politik seperti Fundamentalisme atau Literalisme. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat masalah dengan terminologi. Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 206. Ada banyak pandangan miring mengenai Islam politik, utamanya pada masa Orde Baru, dimana Islam politik sering disebut sebagai ekstrem kanan, NII, mendirikan negara Islam, dan anti-Pancasila. Hal ini menyebabkan banyak korban berjatuhan, walaupun keadaan mulai berubah setelah surutnya generasi yang mengalami trauma DI/TII. Lihat, Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, h. 198-199.

Utsmani berdasarkan struktur sosial masyarakatnya serta pemahaman mereka mengenai konsep politik Islam terutama sekali mengenai konsep khilafah. Pemahaman ini juga dibingkai dengan kondisi sosial politik yang sedang berlangsung sehingga pemahaman terhadap wacana khilafah di tahun 1920-an jelas berbeda dengan saat ini, walau tidak menutup kemungkinan terdapat kesamaan di antaranya.

Beranjak dari berbagai paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tesis dengan judul *Respon Umat Islam Hindia Belanda Atas Keruntuhan Turki Utsmani 1924*.

B. Rumusan Masalah

Fokus dari permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah menjawab mengenai alasan mengapa umat Islam di Hindia Belanda merespon keruntuhan Turki Utsmani serta bentuk respon dan dampaknya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang hubungan umat Islam Hindia Belanda terhadap Turki Utsmani?
2. Bagaimana respon umat Islam Hindia Belanda ketika Turki Utsmani mengalami keruntuhan pada 1924?
3. Bagaimana dampak keruntuhan Turki Utsmani terhadap umat Islam Hindia Belanda?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah di atas, hal yang menjadi batasan masalah adalah:

1. Bentuk respon yang ditunjukkan umat Islam Hindia Belanda dalam melihat peristiwa keruntuhan Turki Utsmani yang ditandai dengan penghapusan jabatan khalifah pada 3 Maret 1924.
2. Umat Islam Hindia Belanda yang merespon keruntuhan Turki Utsmani terdiri dari golongan pembaharu dan tradisional.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian tesis ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah melengkapi hasil penelitian dan karya-karya tulis tentang hubungan antara umat Islam di Hindia Belanda terhadap Turki Utsmani, terutama menjelang keruntuhannya pada 1924. Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini untuk memperkaya khazanah historiografi lokal.

Tujuan khusus dari penelitian ini untuk menjelaskan secara deskriptif analitis tentang permasalahan yang ditanyakan pada subbab perumusan masalah, yaitu:

1. Mengungkap latar belakang hubungan umat Islam Hindia Belanda terhadap Turki Utsmani.
2. Membahas respon umat Islam Hindia Belanda ketika Turki Utsmani mengalami keruntuhan pada 1924.

3. Menganalisis mengenai dampak keruntuhan Turki Utsmani terhadap umat Islam di Hindia Belanda.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki dua kegunaan, yaitu guna teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis-akademis penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terkait dinamika umat Islam di Hindia Belanda dalam merespon isu-isu politik, lebih khusus lagi dalam merespon keruntuhan Turki Utsmani. Dalam bentuk yang kongkrit, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang teori yang dapat digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan isu-isu Islam transnasional.

Sementara itu, guna praktis penelitian ini yaitu dapat menjadi acuan maupun panduan lebih lanjut bagi para peneliti yang memiliki topik penelitian yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam tesis ini. Bagi para pembaca, penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman bahwa terdapat ikatan teologis-politis yang kuat antara umat Islam terhadap jabatan khalifah dan membuktikan bahwa upaya revitalisasi khilafah bukanlah sesuatu yang baru dan tidak pernah ada sejarahnya (*ahistoris*) di negeri ini. Bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam menyikapi/merespon berbagai gagasan transnasional dan terutama sekali gagasan khilafah.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ilmiah tentunya tidak dapat lepas dari tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sangat penting untuk menelusuri dan menelaah

kepuustakaan, sehingga dapat dipelajari sebagaimana kerangka untuk landasan jalannya pemikiran terhadap permasalahan yang akan diteliti. Berbagai pustaka yang digunakan dalam penelitian ini membantu untuk menyusun kepingan peristiwa sejarah yang berserakan menjadi suatu kepingan yang utuh sesuai dengan tema penelitian. Adapun kajian pustaka utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pustaka pertama yaitu dari Husnul Aqib Suminto dalam bukunya *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken*. Buku ini adalah karya disertasi Husnul Aqib Suminto di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di dalam buku ini dijelaskan tentang keterkaitan Pan-Islam dengan jabatan khalifah. Buku ini turut pula menjelaskan tentang respon dan rasa kekhawatiran pemerintahan Hindia Belanda atas pengaruh gagasan Pan-Islam yang dipelopori Turki Utsmani di Hindia Belanda sehingga pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan politik pemisahan urusan politik dan agama serta berujung sebagai kebijakan pembentukan Kantor Agama/Departemen Agama di Hindia Belanda. Pustaka ini dapat peneliti jadikan acuan karena menjelaskan secara teoritis tentang Pan-Islam dan Khilafah serta pemahaman umat Islam saat itu tentang keduanya.

Pustaka berikutnya, Deliar Noer dalam bukunya *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1901-1942* yang memaparkan tentang dinamika umat Islam pada tahun 1920-an. Buku ini juga adalah karya disertasi Deliar Noer di Amerika Serikat. Melalui buku ini dapat diketahui kondisi umat Islam di Indonesia saat persoalan khilafah ini muncul. Pengetahuan ini berfungsi sebagai pisau analisis

untuk memahami latar belakang umat Islam di Indonesia tertarik dengan persoalan khilafah. Buku ini juga menjelaskan latar belakang umat Islam Hindia Belanda -yang terhimpun dalam beragam organisasi Islam- atas gagasan-gagasan kebangsaan dimasanya, dimana salah satunya adalah Sarekat Islam yang dapat dikatakan memiliki peran yang sentral dalam merespon keruntuhan Turki Utsmani.

Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu buku karangan Yudi Latif, yang berjudul *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20* terbitan tahun 2012. Buku ini adalah karya disertasi Yudi Latif di Australia yang banyak menjelaskan mengenai masa pergerakan nasional hingga orde baru/abad ke-20 M di Indonesia, yang dikhususkan pada dinamika umat Islam di Indonesia. Buku ini dapat digunakan dalam memperoleh gambaran mengenai kondisi masyarakat Islam Indonesia pada zaman pergerakan, sehingga latar belakang masyarakat yang ada dapat digunakan untuk menjelaskan sikap-sikap politik yang muncul dari berbagai peristiwa yang terjadi di masa itu. Kondisi pergerakan di berbagai belahan dunia, termasuk di Turki Utsmani disebut memiliki pengaruh terhadap perjuangan rakyat Hindia Belanda (Indonesia).

Buku dari Azyumardi Azra, yaitu *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaharuan Islam Indonesia* menjadi pustaka berikutnya. Buku ini adalah karya disertasi Azyumardi Azra di Amerika Serikat. Buku ini secara garis besar menjelaskan hubungan ulama-ulama Nusantara terhadap kawasan timur tengah utamanya kawasan *Haramayn*. Namun, di dalam bab awal pembahasannya, disinggung pula hubungan emosional antara

Nusantara dan Turki Utsmani yang telah berlangsung pada abad ke-17 M. Walau tidak banyak menyinggung dinamika hubungan Turki Utsmani dan Nusantara secara lebih jauh, terutama pada awal abad ke-20 M, tetapi buku ini dapat menjadi pengantar latar belakang hubungan antara umat Islam di Nusantara (Hindia Belanda) terhadap Turki Utsmani.

Disertasi yang ditulis oleh Wardini Akhmad dari IAIN (belum menjadi UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Kongres Al-Islam 1922-1941: Satu Telaah Tentang Integrasi dan Disintegrasi Organisasi-Organisasi Islam di Indonesia dalam Perkembangan Pergerakan Nasional* menjadi pustaka selanjutnya. Disertasi ini membahas secara spesifik tentang kongres al-Islam yang diadakan di Hindia Belanda. Kongres al-Islam sendiri merupakan sebuah pertemuan yang menghimpun beragam golongan dan organisasi umat Islam untuk berkumpul membahas suatu isu. Dari rangkaian panjang kongres ini, ada masa dimana isu mengenai keruntuhan Turki Utsmani dibahas secara khusus. Pembahasan mengenai kongres al-Islam ini menjadi penting dalam penelitian ini untuk membangun salah satu subbab dalam penelitian ini.

Pustaka terakhir adalah tulisan dari Martin van Bruinessen dalam jurnal *Studia Islamika* Vol. 2, No. 3, tahun 1995 yang tulisannya berjudul *Muslim of The Dutch East Indies and The Caliphate Question*. Secara sistematis, van Bruinessen menjelaskan tentang perjuangan khilafah di Indonesia pada tahun 1920-an. Penjelaskannya dimulai dari sejarah hubungan Turki Usmani dengan umat Islam di Indonesia berlanjut pada respon umat Islam Indonesia saat Turki Usmani diruntuhkan. Jurnal ini menjelaskan tentang kronologi perjuangan khilafah hingga

kemudian persoalan khilafah ini hilang di Indonesia. Keberadaan jurnal ini sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian tesis ini.

Peneliti melihat bahwa pustaka-pustaka ini masih berisi kepingan-kepingan kisah yang kemudian akan disatukan oleh peneliti dalam satu penelitian tersendiri. Yang terpenting adalah karya Martin van Bruinessen, dimana dalam upaya membangun penelitian ini tulisan Martin menjadi kepingan yang cukup besar. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki distingsi dengan tulisan Martin van Bruinessen. Karya ini adalah pengembangan lebih lanjut dari tulisan Martin yang sebatas menyoroti bagaimana respon umat Islam atas keruntuhan Turki Utsmani *an sich* dan terbatas pada apa yang terjadi selama pelaksanaan kongres al-Islam saja. Penelitian ini menambahkan beberapa bahasan lebih lanjut mengenai kronologi peristiwa dari permulaan hingga akhir dari kabar keruntuhan Turki Utsmani. Walhasil, dari pustaka-pustaka atau penelitian-penelitian ini kemudian dapat menjadi informasi awal bagi peneliti untuk menulis tentang respon umat Islam Hindia Belanda atas keruntuhan Turki Utsmani tahun pada 1924.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan sejarah lazim dibedakan menjadi dua macam sejarah yaitu sejarah prosesusal (sejarah deskriptif-naratif dan sejarah struktural (sejarah deskriptif-analitis). Penelitian ini sendiri dapat digolongkan dalam sejarah struktural. Sejarah struktural mengungkapkan aspek struktural dari kejadian-kejadian-kejadian dengan biasanya menggunakan analisis sehingga umumnya

sejarah struktural mau tidak mau dapat menjadi sejarah analitis. Sejarah struktural tidak hanya menceritakan sejarah secara naratif, melainkan juga mengkaji hukum kausalitas terjadinya atas suatu peristiwa yang telah terjadi dengan menganalisis peristiwa tersebut secara mendalam tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual dan unsur-unsur proses sejarah yang dikaji. Dengan kata lain, suatu peristiwa sejarah tidak hanya dilihat dari aspek pertumbuhan, perkembangan, dan keruntuhan suatu peristiwa itu saja, melainkan bagaimana kita menganalisis secara mendalam terjadinya suatu peristiwa sejarah tersebut. Penulisan sejarah struktural umumnya digunakan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menguji kebenaran atau ketepatan, serta penjelasan suatu peristiwa kolektif.³³

Sejarah struktural kemudian dengan sendirinya memiliki implikasi metodologis yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan sejarah prosesual. Dalam sejarah struktural diperlukan perlengkapan analitis dengan menggunakan bantuan dari ilmu-ilmu sosial lain, seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan lain sebagainya.³⁴ Hal ini diperlukan untuk menghasilkan karya sejarah yang holistik/menyeluruh.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan berbagai konsep dan teori untuk membangunnya menjadi sebuah karya ilmiah yang utuh. Konsep-konsep dan teori-teori ilmu sosial digunakan dalam melakukan analisis.³⁵ Dalam konteks ini, penggunaan berbagai konsep dan teori adalah sebagai pisau analisis terhadap suatu peristiwa agar dapat dipahami secara utuh. Selain itu penggunaan konsep

³³ Helius Sjamsudin, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), h. 62.

³⁴ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 110-111.

³⁵ *Ibid*, 110-111.

dan teori juga bertujuan untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian serta memprediksi dan membantu menemukan fakta tentang sesuatu hal yang hendak diteliti.³⁶

Dalam penelitian/tesis ini digunakan teori antara hubungan Islam dengan kondisi sosial politik dalam masyarakat. Tesis ini akan melihat bagaimana umat Islam yang diwakili oleh para elit politik Islam merespon akan kejatuhan Turki Utsmani dengan latar belakang sosial, budaya, politik, juga ideologi yang berkembang dan sangat dinamis dimasa itu. Di tengah beragamnya konsep dan tipologi mengenai kelompok Islam dewasa ini berdasarkan respon politik mereka, maka penting untuk menggunakan suatu teori yang cocok dalam konteks penelitian ini. Untuk itu teori trikotomi dapat diajukan sebagai kerangka teori besar yang melihat hubungan antara Islam dan negara.

Teori trikotomi dirumuskan oleh Allan Samsons dan beberapa ahli lainnya seperti B.J. Boland. Teori ini berlandaskan pada pertanyaan bagaimanakah para aktivis politik Muslim saat itu memberi respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapkan kepada mereka. Teori ini memusatkan perhatian kepada keragaman dan kompleksitas politik Islam yang dengannya merumuskan tiga pendekatan (respon) politik -fundamentalis, reformis, dan akomodasionis- di dalam masyarakat politik Muslim.³⁷

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 57.

³⁷ Teori ini terlihat dalam karya-karya yang ditulis Allan Samson dan juga B.J. Boland. Mereka menjelaskan tipologi respon politik kaum muslim yang tercermin dalam varian tiga kelompok. Pertama, kelompok fundamentalis mendukung jenis penafsiran atas Islam yang kaku dan murni, menentang pemikiran sekular, pengaruh Barat dan sinkretisme kepercayaan tradisional, dan menekankan keutamaan agama atas politik. Kedua, kelompok reformis yang mana secara teoretis juga menekankan keutamaan agama atas politik, tetapi mereka jauh lebih mau bekerjasama dengan kelompok-kelompok sekular atas landasan yang sama-sama disepakati dibandingkan dengan kelompok fundamentalis. Mereka juga amat peduli dengan usaha menjadikan keyakinan agama relevan dengan era modern. Ketiga, kelompok akomodasionis yang memberi

Teori trikotomi lebih lanjut melihat bahwa keragaman respons politik Islam juga menunjukkan berkembangnya pandangan berdimensi ganda mengenai Islam sebagai ideologi perjuangan politik. Ada kecenderungan di dalam masyarakat politik Muslim untuk memandang ideologi Islam baik sebagai simbol pemersatu maupun sebagai tuntutan imperatif. Bagi kelompok fundamentalis, berbanding lurus dengan pandangan mereka tentang kekuasaan dan perjuangan umat Islam, pergulatan demi ideologi Islam adalah sebuah tuntutan yang harus dilakukan/imperatif. Sebaliknya, baik kelompok reformis maupun akomodasionis mau menerima kompromi ideologis dalam rangka mendapatkan konsesi-konsesi politis tertentu. Kepemimpinan politik dua kelompok yang terakhir ini jelas lebih pragmatis, bahwa bersekutu dengan penguasa-penguasa sekular diperbolehkan sejauh hal itu menguntungkan kelompok-kelompok yang mereka wakili. Dengan mengajukan konsep keragaman di kalangan elit politik Islam, teori ini menegaskan bahwa upaya-upaya untuk menyelaraskan aspirasi politik di kalangan umat Islam realitas politik adalah sesuatu yang nyata. Meskipun demikian, upaya-upaya penyelarasan semacam itu hanya berhasil sebagian, karena kegagalan

penghargaan tinggi kepada kerangka persatuan yang diberikan Islam, tetapi mereka mempertahankan pandangan bahwa kepentingan-kepentingan sosial dan ekonomi harus mendapat prioritas utama oleh organisasi-organisasi Islam. Lebih jauh, mereka menekankan keharusan untuk mengakui kepentingan-kepentingan yang bisa dibenarkan dari kelompok-kelompok sekular dan bekerjasama dengan mereka atas landasan yang sama-sama disepakati. Karena itu, sementara dapat dikatakan bahwa kelompok fundamentalis beranggapan bahwa satu-satunya kekuasaan politik yang absah adalah kekuasaan politik yang bersifat religius, kelompok reformis dan akomodasionis tidak menganut gagasan mengenai keabsahan kekuasaan politik yang sempit seperti itu. Bagi mereka, sejauh kekuasaan sekular tidak memusuhi Islam, kekuasaan itu dapat dianggap sah. Sejalan dengan konsep tentang kekuasaan seperti disebutkan di atas, maka tujuan akhir konsep politik perjuangan umat Islam kelompok fundamentalis adalah pembentukan negara Islam. Sementara itu, bagi kelompok reformis, tujuan akhirnya adalah kemenangan partai-partai Islam secara formal dalam pemilihan umum. Dengan itu, maka kesempatan untuk membangun sebuah masyarakat Islam -dan tidak serta-merta harus negara Islam- menjadi terbuka lebar. Hanya kelompok akomodasionis sajalah yang dianggap bersedia menurunkan seruan ideologis dan politisnya, untuk mendapatkan jaminan-jaminan administratif dan politis. Lebih jauh lihat, Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (terj: Ihsan Ali-Fauzi dan Rudy Harisyah Alam), (Jakarta: Paramadina, 2009), h. 44-49.

mencapai kompromi dan tawar-menawar politik hanya mengakibatkan beralihnya arah gerak perpolitikan, dari yang semula lentur malah menjadi semakin kaku. Perlu pula ditekankan bahwa teori ini memberikan penggambaran yang luas diterima mengenai politik Islam sebagai politik yang benar-benar memusuhi politik yang “netral agama”. Kelompok fundamentalis akan selalu berhadapan secara langsung dengan kelompok reformis dan juga akomodasionis. Hal ini mengingat dalam teori/pendekatan ini juga mengakui adanya obsesi masyarakat politik Muslim dengan gagasan negara (Islam) sebagai sebuah tuntutan ideologi.

Dalam konteks penelitian ini, yang mengambil batasan temporal di tahun 1920-an, teori ini dapat digunakan untuk melihat respon umat Islam -yang sejatinya juga tidak tunggal dikarenakan beragamnya kelompok Islam- atas peristiwa keruntuhan Turki Utsmani. Benang merah yang dapat ditarik dari teori trikotomi atas penelitian ini adalah umat Islam Hindia Belanda ternyata memiliki kecenderungan melihat politik Islam sebagai sebuah tuntutan imperatif dimana mereka juga memiliki obsesi untuk mengembalikan Islam sebagai jalan kekuasaan politik (khilafah) walau di sisi yang lain mereka melakukannya karena dilatarbelakangi kepentingan masing-masing.

Penggunaan teori ini menunjukkan beberapa respon -walau tidak menggunakan dikotomi kelompok Islam fundamentalis, reformis, dan akomodasionis- yang ditunjukkan oleh umat Islam Hindia Belanda dalam menanggapi peristiwa keruntuhan Turki Utsmani yang dalam hal ini terwakili dalam arus ideologi -Islam, komunis, dan nasionalis- di tahun 1920-an. Respon yang ditunjukkan pada akhirnya dapat digunakan untuk menggambarkan

mengenai ideologi, konsep dan upaya perjuangan umat Islam, yang menjadi bagian integral batang tubuh politik Islam.

Teori trikotomi yang menunjukkan keragaman respon politik kemudian berkaitan dengan teori respon. Menurut Soerjono Soekanto, respon sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku yang sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu. Respon berasal dari kata *response*, yang berarti balasan atau tanggapan (*reaction*). Respon adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang di terima oleh panca indra. Hal yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak laku jika menghadapi suatu rangsangan tertentu.³⁸

Kartini Kartono melihat respon atau tanggapan adalah kesan-kesan yang dialami, jika perangsang sudah tidak ada, jika proses pengamatan sudah berhenti, dan hanya tinggal kesan-kesan saja, peristiwa sedemikian ini disebut tanggapan. Pendek kata respon muncul jika diawali dengan suatu stimulus. Dalam hal ini, maka teori respon diawali dengan stimulus dan disebut dengan teori rangsang balas. Teori rangsang balas (*stimulus respon theory*) adalah kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak laku tertentu kalau ia mengalami rangsang tertentu. Sikap ini terjadi biasanya terhadap benda, orang, kelompok, nilai-nilai dan semua hal yang terdapat di sekitar manusia. Respon dimunculkan dalam beragam sikap. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang, karena sikap

³⁸ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 48.

merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak laku kalau ia menghadapi suatu rangsangan tertentu.³⁹

Dalam pembahasan teori respon juga tidak terlepas dari pembahasan teori komunikasi, karena respon merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat proses komunikasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang memengaruhi respon seseorang dari apa yang dikomunikasikannya, yaitu pertama, diri orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap, motif, kepentingan, dan harapannya. Kedua, sasaran respon tersebut berupa orang, benda, atau peristiwa. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakan-tindakan, dan ciri-ciri lain dari sasaran respon turut menentukan cara pandang orang. Ketiga, faktor situasi dimana respon dapat dilihat secara kontekstual. Hal ini berarti dalam situasi mana respon itu timbul serta mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam pembentukan atau tanggapan seseorang.⁴⁰

Indonesia diawal abad ke-20 M masuk pada suatu masa yang diistilahkan dengan dasawarsa ideologi dalam sejarah modern Indonesia.⁴¹ Di masa ini pulalah berbagai jenis ideologi, yang kemudian akan berpengaruh dalam pertumbuhan keagamaan dan dasar ideologi perjuangan, mulai diperdebatkan di kalangan kaum pergerakan nasional termasuk pula ideologi komunis dan nasionalis (sekular).

³⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 121.

⁴⁰ Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, (Bandung: Rosda Karya, 1999), h. 18-19.

⁴¹ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 15.

Dalam jiwa zamannya,⁴² pencarian akan identitas ideologi ini menjadi penting untuk dilakukan. Bagi umat Islam Hindia Belanda peristiwa runtuhnya Turki Utsmani juga dapat didasari dengan adanya ajaran dalam Islam yang menyatakan bahwa sesama umat Islam adalah bersaudara.⁴³

Konsep persaudaraan (kesetiakawanan) dan (termasuk pula) politik (kepemimpinan) menjadi stimulus awal bagi umat Islam Hindia Belanda dalam merespon peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengannya. Belum lagi dengan kondisi situasional sosial politik yang menjadikan peristiwa keruntuhan Turki Utsmani menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan tanpa sebuah respon. Dengan kata lain, adalah sesuatu yang alamiah jika keruntuhan Turki Utsmani di tahun 1924 M direspon oleh umat Islam di Hindia Belanda.

Konsep persaudaraan dan politik ini turut pula memunculkan perasaan/emosi. Semua emosi pada dasarnya menjadi stimulus dari terbentuknya respon/perilaku. Emosi adalah dorongan untuk bertindak, rencana seketika untuk mengatasi masalah yang telah ditanamkan secara berangsur-angsur (evolusi), dan emosi juga sebagai perasaan dan berbagai pikiran khas, suatu keadaan biologis

⁴² Di dalam konteks penulisan sejarah (historiografi), dikenal konsep *zeitgeist* atau jiwa zaman yang berarti suatu peristiwa sejarah yang terjadi akan sangat terkait erat dengan jiwa zaman masyarakat yang hidup dimasanya. Nina Herlina, *Historiografi Indonesia dan Permasalahannya*, (Bandung: Satya Historika, 2009), h. 10.

⁴³ Islam menjunjung tinggi persaudaraan antara umatnya. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an, surah al-Hujurat ayat 10, "*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*" Dalam hadis, Rasulullah saw juga telah membuat sebuah perumpamaan tentang persaudaraan seorang muslim dengan muslim lainnya dalam hadits berikut: "*Orang mukmin itu bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Kemudian Nabi Muhammad menggabungkan jari-jari tangannya. Ketika itu Nabi Muhammad duduk, tiba-tiba datang seorang lelaki meminta bantuan. Nabi hadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda: Tolonglah dia, maka kamu akan mendapatkan pahala. Dan Allah menetapkan lewat lisan Nabi-Nya apa yang dikehendaki.*" (H.R. Imam Bukhari, Muslim, dan An Nasa'i). Pada hadits lain, Rasulullah membuat perumpamaan lain tentang persaudaraan kaum muslimin. Sebagaimana sabda beliau: "*Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta-mencintai, sayang-menyayangi dan bahu-membahu, seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam.*" (H.R. Muslim). Ali Abdul Halim Mahmud, *Karakteristik Umat Terbaik: Telaah Manhaj, Akidah, dan Harakah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 127-128.

dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi dapat dikelompokkan pada rasa amarah, kesedihan, takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, malu, dan sebagainya.⁴⁴

Dalam konteks ini juga, teori respon menjadi erat dengan salah satu teori dalam komunikasi yaitu teori citra. Turki Utsmani dapat dikatakan sebagai sebuah obyek/organisasi yang berhasil mencitrakan dirinya terhadap dunia luar. Turki Utsmani, berdasarkan teori citra merupakan *Current Image* (citra yang berlaku). Citra yang berlaku adalah suatu citra atau pandangan yang dianut oleh pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Citra ini sepenuhnya ditentukan oleh banyak-sedikitnya informasi yang dimiliki oleh mereka yang memercayainya.⁴⁵

Citra adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan seseorang terhadap suatu obyek tertentu. Sikap dan tindakan seseorang terhadap suatu objek tertentu tadi akan ditentukan oleh citra objek tersebut.⁴⁶ Citra terbentuk dengan adanya empat komponen pembentuk yaitu, persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap.⁴⁷

⁴⁴ Daniel Goleman, *Emotional Intelligence* (terj: T. Hermaya), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 7. Dalam bidang psikologi, masalah emosi merupakan masalah yang belum terpecahkan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pernyataan yang jelas tentang definisi emosi itu sendiri. Dan para psikolog telah berusaha memberi pengertian emosi namun pernyataan mereka masih terbentur dengan tidak adanya pemisahan secara jelas antara definisi dari perasaan dan emosi sehingga masih ambigu.

⁴⁵ Frank Jefkins, *Public Relations* (terj: Haris Munandar), (Jakarta: Erlangga, 1998), h. 20.

⁴⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 79.

⁴⁷ Persepsi, diartikan sebagai hasil pengamatan unsur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan dengan kata lain. Individu akan memberikan makna terhadap rangsang berdasarkan pengalamannya mengenai rangsang. Kemampuan mempersepsi inilah yang dapat melanjutkan proses pembentukan citra. Persepsi atau pandangan individu akan positif apabila informasi yang diberikan oleh rangsang dapat memenuhi kognisi individu. Kognisi, yaitu suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus keyakinan ini akan timbul apabila individu harus diberikan informasi-informasi yang cukup dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya. Motivasi dan sikap yang ada akan menggerakkan respon seperti yang diinginkan oleh pemberi rangsang. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir, dan merasa dalam menghadapi obyek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan perilaku tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu, sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi sikap menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu, menentukan apa yang disukai, diharapkan dan diinginkan, sikap mengandung aspek evaluatif artinya mengandung nilai menyenangkan atau



Proses⁴⁸ di atas menunjukkan bagaimana stimulus yang berasal dari luar diorganisasikan dan memengaruhi respons. Stimulus atau rangsangan yang diberikan pada individu dapat diterima atau ditolak. Jika rangsangan ditolak, maka proses selanjutnya tidak akan berjalan. Sebaliknya, jika rangsangan itu diterima oleh individu, berarti terdapat komunikasi dan perhatian, dengan demikian proses selanjutnya dapat berjalan. Gambar ini dapat menerangkan kedudukan serta peristiwa runtuhnya Turki Utsmani sebagai suatu stimulus yang direspons berdasarkan berbagai aspek yang ada pada umat Islam di Hindia Belanda.

Berdasarkan kerangka teori ini dapat disimpulkan bahwa arah dan fokus penelitian ini ada pada upaya melihat beberapa respon yang berwujud sikap politik Islam yang ditunjukkan umat Islam di Hindia Belanda atas stimulus berupa peristiwa keruntuhan Turki Utsmani pada tahun 1924. Pembahasan dalam penelitian ini juga diarahkan pada upaya mengungkapkan berbagai aspek kausalitas dari dimunculkannya respon oleh umat Islam Hindia Belanda atas keruntuhan Turki Utsmani.

tidak menyenangkan, sikap juga diperhitungkan atau diubah. Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, *Dasar-dasar Public Relations*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 113.

⁴⁸ Gambar diolah dari, *Ibid*, 114.

G. Definisi Konseptual

Penelitian dalam bentuk tesis ini diberi judul “Respon Umat Islam Hindia Belanda atas Keruntuhan Turki Utsmani pada 1924”. Untuk memudahkan dan menghindari interpretasi yang berbeda-beda, maka peristilahan yang terdapat dalam judul akan dijelaskan secara konseptual-teknis sesuai dengan yang dimaksud dalam tesis ini.

Respon secara bahasa berarti tanggapan, reaksi, atau jawaban terhadap stimulus yang diberikan.⁴⁹ Secara istilah respon berarti setiap tingkah laku yang pada hakikatnya merupakan tanggapan atau balasan (respon) terhadap rangsangan atau stimulus.⁵⁰ Umat secara bahasa adalah para penganut (pemeluk, pengikut) suatu kepercayaan/agama.⁵¹ Sementara itu, Islam secara bahasa adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.⁵² Dalam konteks ini maka pengertian umat Islam secara istilah berarti himpunan pengikut Nabi Muhammad saw.⁵³

Hindia Belanda adalah nama sebuah kawasan daerah jajahan Belanda. Hindia Belanda juga merupakan wilayah yang tertulis dalam UU kerajaan Belanda tahun 1814 sebagai wilayah berdaulat kerajaan Belanda. UU ini diamandemen tahun 1848, 1872, dan 1922 menurut perkembangan wilayah Hindia Belanda sendiri.⁵⁴ Keruntuhan secara bahasa berasal dari kata dasar runtuh yang berarti rusak atau hancur sama sekali (terkait kekuasaan, pertahanan, dan sebagainya), sehingga keruntuhan berarti keadaan runtuh, rusak, atau

⁴⁹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1204.

⁵⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, h. 121.

⁵¹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1586.

⁵² *Ibid*, 565.

⁵³ Lihat dalam, Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 432.

⁵⁴ Lebih jauh lihat, R.E. Elson, *The Idea of Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Gagasan* (terj: Zai Anshor), (Jakarta: Serambi, 2009), h. 1-2.

hancur.⁵⁵ Turki Utsmani sendiri adalah nama imperium/kekhalifahan terakhir yang setelah runtuh digantikan dengan negara Turki modern saat ini.⁵⁶

Atas dasar definisi ini, maka pendeskripsian secara konseptual dalam penelitian ini berarti respon atau tanggapan yang dilakukan oleh umat Islam di kawasan Hindia Belanda terhadap suatu stimulus atau rangsangan. Stimulus itu sendiri adalah peristiwa keruntuhan (kekuasaan pemerintahan) Turki Utsmani yang terjadi di tahun 1924.

H. Metodologi Penelitian

Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah sangatlah penting, terutama sebagai pedoman dalam pengumpulan sumber dan pembahasan permasalahan. Terdapat dua batasan ruang lingkup, yaitu lingkup spasial dan temporal sebagai berikut:

1. Lingkup Spasial

Ruang lingkup ini merupakan batasan geografis dari obyek penelitian, yaitu kawasan Hindia Belanda dengan subjek umat Islam Hindia Belanda. kawasan Hindia Belanda yang dimaksud adalah kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini, terutama sekali banyak difokuskan pada kawasan pulau Jawa sebagai pulau dengan jumlah penduduk (muslim) terbanyak.

⁵⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, h. 1232.

⁵⁶ Lihat dalam, Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, h. 182.

2. Lingkup Temporal

Pemilihan lingkup temporal antara tahun 1924 sampai dengan 1930 dengan pertimbangan sebagai berikut. Tahun 1924 adalah tahun runtuhnya kekuasaan Turki Utsmani, yang sejak saat itu muncul dinamika pergerakan untuk merespon peristiwa ini, walaupun di tahun-tahun sebelumnya umat Islam Hindia Belanda telah menaruh perhatian dan juga ketertarikan terhadap Turki Utsmani. Sementara itu, tahun 1930 digunakan dengan pertimbangan bahwa isu keruntuhan Turki Utsmani telah mulai ditinggalkan oleh umat Islam Hindia Belanda. Tahun 1930 juga merupakan akhir dari dasawarsa ideologi, sehingga gagasan Pan-Islam yang berkaitan dengan khilafah dan Turki Utsmani di tahun ini juga telah ditinggalkan. Pada tahun-tahun selanjutnya wacana/gagasan yang berkembang telah mengalami dinamika yang berbeda dengan masa dasawarsa ideologi, sehingga 1930 menjadi batasan temporal akhir dalam melihat respon umat Islam terkait dengan keruntuhan Turki Utsmani.

Jenis Penelitian

Penelitian ini ditinjau dari tujuannya merupakan penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif (*explorative research*) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang sebelumnya belum ada atau penelitian yang bertujuan menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang memengaruhi terjadinya sesuatu.⁵⁷

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 14.

Berdasarkan pendekatannya maka penelitian ini dapat digolongkan dalam pendekatan *longitudinal*. Penelitian ini melihat subjek yang sama dengan metode *time series* atau kronologis yang mementingkan adanya runutan waktu. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan jenis informasi yang sama pada dua atau lebih periode waktu, sehingga dapat mengamati adanya perubahan fitur dari unit atau dapat melacak kondisi dari waktu ke waktu sehingga dapat melihat pola perubahan keseluruhan dengan lebih jelas.⁵⁸

Ditinjau dari bidang ilmunya, penelitian ini adalah penelitian sejarah. Penelitian sejarah merupakan penelaahan sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Dengan kata lain yaitu penelitian yang bertugas mendeskripsikan gejala, tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan. Penelitian sejarah mencoba merekonstruksi apa yang terjadi pada masa yang lalu selengkap dan seakurat mungkin, dan biasanya menjelaskan mengapa hal itu terjadi.

Dilihat dari tempatnya, penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Dalam penelitian pustaka, peneliti sedapat mungkin mengenal dan mengetahui secara persis kondisi perpustakaan sebagai tempat pengumpulan data pustaka dengan sebaik mungkin. Sebab dengan mengenal situasi perpustakaan, peneliti akan dengan mudah menemukan apa yang dibutuhkannya. Penelitian kepustakaan tidak hanya sekadar membaca dan mencatat literatur atau buku-buku semata. Kegiatan yang dilakukan dalam studi kepustakaan berupa

⁵⁸ *Ibid*, 15.

pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁵⁹

Ditinjau dari hadirnya variabel, penelitian ini adalah penelitian dengan variabel masa lalu atau *ex post facto*. Penelitian yang obyeknya variabel masa lalu dapat disebut juga penelitian deskriptif. Penelitian ini variabelnya sudah hadir sebelum penelitian dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu yang dalam hal ini ingin menemukan variabel di masa lalu.⁶⁰

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dihasilkan dari suatu prosedur penelitian yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau sering pula disebut data deskriptif.⁶¹ Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, serta termasuk data kontemporer.⁶² Data primer sendiri merupakan data yang didapatkan dari sumber primer dan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber sekunder.

⁵⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), h. 2-3.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, h. 17-18.

⁶¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 60.

⁶² Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2008), h. 9.

b. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya.⁶³ Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen. Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis/gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi.⁶⁴ Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat kabar, laporan, catatan harian, biografi, foto, dan data lain yang terdokumentasikan. Sumber data, baik sumber data primer, sekunder, maupun kontemporer diperoleh dari berbagai tempat,⁶⁵ terutama sekali perpustakaan sebagai laboratorium utama penelitian ini. Adapun perpustakaan-perpustakaan yang dijadikan oleh peneliti sebagai tempat data diperoleh di antaranya:

1. Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Raden Fatah di Palembang.
2. Perpustakaan UIN Raden Fatah di Palembang.
3. Perpustakaan Universitas Sriwijaya di Ogan Ilir
4. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Perpustakaan Nasional Indonesia yang bertempat di Salemba, Jakarta.

Berdasarkan asal usulnya, penelitian ini menggunakan sumber primer, sumber sekunder, dan juga sumber tersier.⁶⁶ Sumber primer adalah bila sumber atau penulis menyaksikan, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, h. 172.

⁶⁴ Nina Herlina, *Metode Sejarah*, h. 21.

⁶⁵ *Ibid*, 18.

⁶⁶ *Ibid*, 9.

dituliskan dalam sumber tersebut.⁶⁷ Dalam penelitian ini, sumber primer yang dipakai berupa berita-berita dari beberapa surat kabar yang terbit di tahun 1924-1930. Secara khusus, peneliti menggunakan surat kabar *Bandera Islam* yang terbit pada 1924 yang banyak memberitakan mengenai respon yang dilakukan umat Islam Hindia Belanda dalam kaitannya dengan upaya revitalisasi khilafah dalam penelitian ini. Beberapa surat kabar sezaman juga peneliti gunakan sebagai sumber primer, seperti surat kabar *Neratja*, *Hindia Baroe*, dan *Fadjar Asia*. Berita-berita dari berbagai surat kabar ini dapat menjadi sumber yang menjelaskan tentang kondisi masyarakat Hindia Belanda dalam merespon keruntuhan Turki Utsmani.

Terkait dengan sumber primer mengenai Turki Utsmani peneliti menggunakan buku yang ditulis oleh Lord Eversley yang berjudul *The Turkish Empire: Its Growth and Decay*. Buku ini terbit pada tahun 1917 dan dapat digolongkan sebagai sumber primer mengenai Turki Utsmani, dimana tahun 1917 Turki Utsmani sendiri masih berdiri sebagai sebuah entitas politik yang mandiri dan buku ini ditulis masih sezaman dengannya.

Sumber sekunder adalah sumber yang telah diolah terlebih dahulu.⁶⁸ Dalam penelitian ini, sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku hasil penelitian yang sebelumnya telah dituliskan dalam sub bahasan tinjauan pustaka. Sumber tersier adalah sumber yang berasal dari hasil karya tulis ilmiah sejarah.⁶⁹ Sumber tersier/kontemporer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-

⁶⁷ *Ibid*, 10.

⁶⁸ *Ibid*, 12.

⁶⁹ *Ibid*, 13.

hasil penelitian, terutama berbentuk jurnal, tesis, maupun disertasi yang memiliki relevansi dalam penelitian ini.

Semua sumber data tersebut diperoleh dengan menggunakan metode historis/sejarah⁷⁰ berupa heuristik dan verifikasi/kritik. Heuristik secara sederhana adalah mencari sumber sejarah melalui berbagai metode tersendiri, tergantung dari jenis data yang ingin didapatkan.⁷¹ Dalam penelitian ini, data yang ingin didapatkan adalah data sejarah terutama berupa data tertulis/kualitatif. Pada langkah ini peneliti melakukan kegiatan heuristik dalam rangka mencari data-data pada tempat-tempat yang diduga kuat menyimpan data tersebut. Dalam hal ini maka, laboratorium dalam penelitian ini adalah perpustakaan sebagai tempat penyimpanan karya pustaka.⁷² Pada proses heuristik ini peneliti mendapatkan beberapa sumber sejarah.

Pasca sumber data berhasil ditelusuri dan didapatkan melalui proses heuristik maka akan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya yaitu tahapan kritik/verifikasi. Kritik adalah upaya pengujian sumber yang telah dihimpun dalam proses heuristik.⁷³ Kritik digunakan sebagai sebuah upaya menguji validitas serta korelasi sumber sejarah yang telah didapatkan. Pada tahapan ini ada dua macam kritik yang dilakukan yaitu kritik ekstern dan intern.

Kritik ekstern ialah kritik yang bertujuan untuk menguji keotentikan suatu sumber termasuk menyelidiki bentuk sumber, usia, waktu, serta segala sesuatu

⁷⁰ Metode historis/sejarah berarti proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau juga rekonstruksi yang imajinatif berdasarkan data yang diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan metode sejarah. Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (terj: Nugroho Notosusanto), (Jakarta: UI Press, 1986), h. 32. Metode sejarah terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, verifikasi/kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam *Ibid*, 15.

⁷¹ *Ibid*, 17.

⁷² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, h. 3-4.

⁷³ Nina Herlina, *Metode Sejarah*, h. 24-25.

yang berkaitan dengan penelitian mengenai asli tidaknya sumber itu.⁷⁴ Dalam konteks ini, data yang digunakan dalam penelitian ini diteliti dari aspek fisik dan penampilan luarnya. Sejumlah data yang didapatkan dari surat kabar yang terbit di tahun 1920-an telah dikatalogkan oleh pihak perpustakaan nasional sehingga dapat dipastikan otentitasnya. Kritik intern kemudian juga turut dilakukan yaitu dengan menguji secara kritis dan akurat mengenai isi sumber, apakah dapat dipercaya kebenarannya (kredibel) atau tidak.⁷⁵ Dalam konteks data yang digunakan dalam penelitian ini maka peneliti memilih data yang kemudian berasal dari pihak-pihak yang peneliti yakini memiliki kredibilitas dan kemampuan di dalamnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁷⁶ Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah proses pengadaan data, baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka/dokumen. Teknik studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.⁷⁷ Data dan Informasi dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah,

⁷⁴ *Ibid*, 25.

⁷⁵ *Ibid*, 30.

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, h. 265.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 83.

jurnal, makalah, tesis dan disertasi, ensiklopedia, surat kabar, dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik tercetak maupun elektronik dengan cara membaca, mencatat, dan mengkategorisasikan data dan informasi berdasar sub-sub masalah.

3. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat sebagai solusi dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian.⁷⁸ Upaya pengolahan data juga menjadi bagian penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memudahkan upaya pemecahan masalah penelitian.⁷⁹ Dalam konteks ini, data yang terkumpul kemudian diolah secara prosedural dengan langkah-langkah berupa display data, reduksi data, manipulasi data, kemudian kategorisasi data.

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan adanya display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁸⁰ Dalam penelitian ini, display data yang digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.

Selanjutnya ditempuh upaya reduksi data. Data yang diperoleh dapat berjumlah cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal

⁷⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, h. 120.

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, h. 278.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 341.

yang penting, serta dicari tema dan polanya.⁸¹ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Dalam konteks ini peneliti mereduksi segala temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola serta menfokuskan diri pada temuan data yang memiliki relevansi dalam penelitian ini.

Data kemudian direduksi dan diadakan proses manipulasi data. Manipulasi data berarti mengubah data tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena.⁸² Manipulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun dan menuliskan kembali berbagai data yang telah dikumpulkan dan direduksi dalam bentuk tertulis, baik dalam bentuk *quotation* (kutipan langsung), *citation* (kutipan tidak langsung), *summary* (ringkasan), maupun *comment* (komentar) agar lebih mudah dipahami.

Langkah terakhir dalam pengolahan data kemudian melakukan kategorisasi data. Kategorisasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Langkah ini merupakan upaya mempermudah pengecekan kembali atas fakta maupun opini.⁸³ Selain itu tujuan pengkategorian ini agar tidak terjadi kekeliruan dan dapat memudahkan peneliti dalam menyusun hasil penelitian ini. Dalam penelitian ini, data dikategorisasikan

⁸¹ *Ibid*, 339.

⁸² Nana S. Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 18.

⁸³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 150.

berdasarkan kebutuhan yang dianggap relevan dalam penelitian berdasarkan sub-sub pembahasan dan secara teknis dikategorisasikan berdasarkan sub-sub judul.

Data yang telah diolah kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif berarti data digambarkan secara kualitatif melalui upaya intepretasi yang tepat dan sistematis.⁸⁴ Dalam konteks ini, data yang telah dikumpulkan kemudian digabungkan satu sama lain sehingga menghasilkan satu kesatuan definisi/konsep yang kemudian dapat dijelaskan dengan menggunakan bantuan metode keilmuan lain -dalam hal ini metode historis-.⁸⁵ Dalam penelitian ini maka, deskriptif berarti penggambaran atau penjelasan berbagai fenomena sosial dan politik umat Islam Hindia Belanda secara utuh berdasarkan data yang sebelumnya telah terkumpul dalam bentuk uraian.

Analisis berarti penjabaran lebih mendalam terhadap data-data yang sebelumnya telah dideskripsikan dengan menunjukkan makna serta penempatan data pada konteksnya masing-masing.⁸⁶ Dalam penelitian ini, analisis mengetengahkan bagaimana umat Islam Hindia Belanda merespon isu keruntuhan Turki Utsmani sesuai dengan dinamika sosial politik yang terjadi saat itu.

Analisis deskritif terhadap data dilakukan dengan menghubungkan dan menganalisa data secara sederhana untuk dapat menghasilkan fakta. Untuk itu, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode historis berupa intepretasi. Interpretasi merupakan tahapan atau kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta

⁸⁴ Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Kompas, 2011), h. 43.

⁸⁵ *Ibid*, 42.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 3-4.

menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta-fakta yang diperoleh.⁸⁷ Dalam tahapan interpretasi, didahului dengan proses analisis, sintesis, dan intervensi (generalisasi) dari data yang diperoleh dengan teori-teori yang relevan. Dalam tahap analisis, data-data sejarah diuraikan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada.⁸⁸ Pada tahap sintesis, berbagai analisis data disatukan untuk dapat menghasilkan data yang mendekati fakta dengan menggunakan berbagai teknik interpretasi dalam sejarah.⁸⁹ Interpretasi kemudian diakhiri dengan adanya tahap generalisasi terhadap data yang sebelumnya telah disatukan.⁹⁰ Pada tahap interpretasi data ini juga dibutuhkan koraborasi/pendukungan dengan data-data lain yang tidak saling bertentangan sehingga dapat menghasilkan gambaran yang mendekati kenyataan.⁹¹ Hasil interpretasi dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

Di samping interpretasi digunakan pula pendekatan keilmuan untuk memahami data secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan multidimensi dengan meminjam teori dan konsep ilmu sosial yang dalam hal ini menggunakan pendekatan politik. Pendekatan politik secara umum memberikan perhatian pada gejala-gejala politik yang ada dalam masyarakat seperti pengaruh dan kekuasaan, kepentingan dan partai politik, keputusan dan kebijakan, konflik dan konsensus, rekrutmen dan perilaku kepemimpinan, masa dan pemilu, budaya politik, sosialisasi politik, masa dan pemilu, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini pula maka pendekatan politik dalam penelitian ini

⁸⁷ Nina Herlina, *Metode Sejarah*, h. 36.

⁸⁸ *Ibid*, 36-37.

⁸⁹ *Ibid*, 38-39.

⁹⁰ *Ibid*, 39.

⁹¹ *Ibid*, 24-35.

ingin melihat macam kegiatan dalam suatu sistem politik menyangkut proses menentukan tujuan secara politis dan bagaimana melaksanakan tujuan itu.⁹²

Respon sebagai bagian dari perilaku manusia dapat pula dilihat dari pendekatan psikologi. Maka, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan psikologi politik berupa pendekatan sikap/perilaku politik. Pendekatan perilaku politik berarti bagaimana sikap/perilaku (*behavior*) sebagai bentuk respon dari negara atau kelompok-kelompok politik dalam mensosialisasikan gagasan-gagasan yang dianutnya, bagaimana proses rekrutmen pemimpin/anggota, dan pelaksanaan atau wujud dari tindakan politiknya.⁹³

Selain itu, digunakan pula pendekatan komunikasi, yang dalam penelitian ini berupa komunikasi politik. Komunikasi politik berarti komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik atau aktor-aktor politik yang berkaitan dengan isu politik/kekuasaan.⁹⁴ Pendekatan komunikasi politik dalam penelitian ini digunakan untuk melihat upaya interaksi dan komunikasi antar entitas politik. Pendekatan komunikasi politik juga digunakan untuk menjelaskan pola-pola penyampaian informasi yang dikomunikasikan oleh masing-masing pihak hingga menghasilkan sebuah respon politik.

J. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dituangkan dalam lima bab. Bab pertama dalam tesis ini adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan

⁹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 8-10.

⁹³ James Drever, *Kamus Psikologi* (terj: Nancy Simanjuntak), (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 29.

⁹⁴ A.S.M. Romli, "Komunikasi Politik", dalam *Diktat Kuliah*, Jurusan Komunikasi Universitas Al-Ghiffari Bandung, Agustus 2014, h. 7.

masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian hingga sistematika penelitian.

Bab kedua membahas mengenai gambaran latar belakang Hindia Belanda di awal abad ke-20 M. Bahasan dalam bab ini bertujuan untuk melihat dinamika masyarakat, terutama umat Islam Hindia Belanda atas beragam latar belakang sosial, politik, dan keagamaan yang berkembang di masa itu. Bab kedua terbagi dalam sub bab dinamika sosial politik Hindia Belanda, wacana kebangkitan dan pembaharuan Islam di Hindia Belanda, polarisasi umat Islam Hindia Belanda, serta relasi Pan-Islam, Turki Utsmani, dan umat Islam Hindia Belanda.

Bab ketiga membahas mengenai dinamika umat Islam Hindia Belanda atas keruntuhan Turki Utsmani. Dalam bab ini dapat dilihat seperti apa respon yang ditunjukkan dengan beragam bentuk serta dinamika beragam kelompok umat Islam dalam merespon dan menyikapi keruntuhan Turki Utsmani. Bab ketiga terbagi dalam sub bab kabar keruntuhan Turki Utsmani di Hindia Belanda, Sarekat Islam sebagai *role leader* wacana Pan-Islam, Kongres al-Islam dan pembentukan Komite Khilafah, penerbitan media massa, serta ditinggalkannya isu khilafah di Hindia Belanda.

Bab keempat membahas mengenai dampak atas keruntuhan Turki Utsmani terhadap perkembangan Islam secara politik di Hindia Belanda. Bahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengungkap seperti apa kondisi sosial, politik, dan agama dalam masyarakat Hindia Belanda pasca keruntuhan Turki Utsmani serta bagaimana umat Islam Hindia Belanda mencitrakan Turki. Bab keempat terbagi dalam sub bab menguatnya wacana Islam komunis, menguatnya wacana

nasionalisme sekuler, citra Turki di Hindia Belanda, serta diskursus soal bentuk negara.

Bab kelima yaitu penutup. Bab ini berupa kesimpulan, saran, serta rekomendasi dari penelitian yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang diajukan. Dengan demikian diharapkan diperoleh suatu gambaran mengenai respon dari umat Islam Hindia Belanda atas keruntuhan Turki Utsmani pada 1924.

K. Historiografi

Hasil analisis dari penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi tertulis yang dalam hal ini adalah sebuah karya sejarah atau historiografi. Penulisan sebuah karya sejarah/historiografi merupakan langkah akhir dari metode historis. Tahapan ini berupa langkah memaparkan dan menerangkan hasil interpretasi hingga menjadi suatu tulisan sejarah.⁹⁵ Dalam tahapan ini peneliti melakukan penulisan sejarah dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian secara kronologis dan hubungan sebab akibat antar peristiwa sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan metode sejarah ini akan dapat dinilai apakah penelitian yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur, memiliki validitas dan reabilitas yang memadai atau tidak sehingga menjadi karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Ketika penelitian telah sesuai dengan metode maka hasil akhir berupa historiografi yang diberi judul *Respon Umat Islam Hindia Belanda atas Kejatuhan Turki Utsmani pada 1924*.

⁹⁵ Nina Herlina, *Metode Sejarah*, h. 55.